

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH
SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN
JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
INDONESIA TAHUN 2010-2018**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

SHEILA SABRINA
12020114130120

**FAKULTAS EKONOMI DAN BINIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sheila Sabrina

Nomor Induk Mahasiswa : 12020114130120

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN,
KESEHATAN, DAN JUMLAH
PENDUDUK MISKIN TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI
INDONESIA TAHUN 2010-2018**

Dosen Pembimbing : Dr. Nugroho, SBM, MSP

Semarang, 26 Juni 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. Nugroho, SBM, MSP

NIP 196105061987031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Sheila Sabrina
Nomor Induk Mahasiswa : 12020114130120
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : **PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN,
KESEHATAN, DAN PENDUDUK MISKIN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2010-
2018**

Dosen Pembimbing : Dr. Nugroho, SBM, MSP

Telah Dinyatakan Lulus Ujian Pada Tanggal

Tim Penguji

1. Dr. Nugroho SBM, MSi (.....)
2. Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, MS (.....)
3. Deden Dinar Iskandar, SE., MA., Ph.D (.....)

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, S.E, M.Com, Akt., Ph.D.)

NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Sheila Sabrina, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2018**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang,

Yang membuat pernyataan

Sheila Sabrina

NIM. 12020114130120

ABSTRACT

The low quality of human resources is a major problem in Indonesia. The quality of human resources in Indonesia is still low, as indicated by Human Development Index (HDI) which ranks 113st out of 188 countries and in position 5 th of the 11 ASEAN countries. When seen from the number of allocations issued by the government of Indonesia, particularly in education and health sectors year to year showed anincreasing trend. Low Human Development in Indonesia may caused by the high number of poor people in Indonesia .

The purpose of this research is to analyze the factors that influence to HDI in Indonesia. In analyzing this research, the writer used is multiple linear regression analysis using the simplest least square method (Ordinary Least Square (OLS) with a fixed effect model. The data used is panel data for 2010-2018.

The results of this study are that the variable government expenditure on education and health has a positive and significant effect on the variable Human Development Index in Indonesia. The level of poverty also has a positive and significant effect on the Human Development Index. This shows a decrease in the number of poor people increased the Human Development Index in Indonesia in the period 1998-2018.

Keywords: Human Development Index (HDI), government expenditure on education, government expenditure on health, and poverty.

ABSTRAK

Rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang masih rendah. Dalam Indeks yang dikeluarkan oleh UNDP posisi Indonesia 113 dari 188 negara di dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia berada pada kisaran negara-negara sedang berkembang dan berada di posisi ke 5 dari 11 negara ASEAN. Jika dilihat dari jumlah alokasi yang dikeluarkan pemerintah daerah Indonesia terutama di sektor pendidikan dan kesehatan dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat. Rendahnya Pembangunan Manusia di Indonesia kemungkinan disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda menggunakan metode kuadrat terkecil sederhana atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*). Data yang digunakan adalah data panel tahun 2010-2018.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Index Pembangunan Manusia di Indonesia. Sedangkan sektor kesehatan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel Index Pembangunan Manusia, dan Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Index Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan turunnya tingkat kemiskinan meningkatkan Index Pembangunan Manusia di Indonesia pada periode 2010-2018.

Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan Kemiskinan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Index Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2018”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, bantuan, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr .Suharmono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro;
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia,,SE.,M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
3. Bapak Dr. Nugroho SBM., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, solusi, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Nenek Woyanti, S.E., M.Si, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis selama penulis belajar di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro.
6. Kedua orang tuaku terkasih, Papa (Izham) dan Mama (Ermayani) terima kasih atas perlindungan, kasih sayang, cinta, dan dukungan serta pengorbanan yang selalu diberikan dengan tulus kepada anak anaknya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang kalian berikan dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Amin;
7. Adikku tersayang, Muhammad Alfian Aulia. Terima kasih untuk dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Teruslah berjuang meraih mimpi membahagiakan Papa dan Mama;
8. Fauzi Ismail, pria besar yang selalu menjaga, menemani dan mengajarkanku banyak hal. Terima kasih untuk setiap perjuangan dan pengorbanan untuk terus bertahan bersamaku.
9. Teman-Teman terdekat IESP 2014 Rima, Novi, Gina, Agnes, Gaby, Zaenal, dan Seluruh teman-teman IESP 2014 terima kasih atas bantuan, kenangan dan kebersamaannya selama empat tahun ini.
10. Sahabat terdekat selama di Semarang, Yuni, dan Uzma Terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupan penulis.

11. Teman-Teman KKN Desa Sukomarto Kec. Jumo, Julius, Fathnisa, Aldila, Ega, dan Prima. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi di kemudian hari.
12. Terakhir untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang akan digunakan demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi temanteman dan pembaca lainnya.

Semarang, 26 Juni 2019

Penulis

Sheila Sabrina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	18
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Konsep Pembangunan.....	20
2.1.2 Pengertian Pembangunan Manusia	23
2.1.3 Index Pembangunan manusia.....	28
2.1.3.1 Menghitung index komponen	29
2.1.3.2 Menghitung IPM.....	29
2.1.3.3 Index Harapan Hidup.....	30
2.1.3.4 Index Pendidikan.....	30
2.1.3.5 Index Hidup Layak.....	31

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah.....	32
2.1.4.1 Definisi.....	32
2.1.4.2 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	37
2.1.4.2.1 Konsep Pengeluaran Pemerintah.....	40
2.1.4.2.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah.....	43
2.1.5 Kemiskinan.....	45
2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan.....	45
2.1.5.2 Penyebab Kemiskinan.....	46
2.1.6 Pengaruh Pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan.....	49
2.1.7 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	50
2.2 Penelitian Terdahulu.....	50
2.3 Kerangka Pemikiran.....	58
2.4 Hipotesis.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Pengantar.....	61
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	61
3.2.1 Variabel Penelitian.....	61
3.2.2. Definisi Operasional Variabel.....	62
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	62
3.4. Metode Pengumpulan data.....	64
3.5. Metode Analisis.....	64
3.5.1. Regresi Linier Berganda.....	64
3.5.2 Uji Hausman.....	66
3.5.3. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	72

4.1.1	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	72
4.1.2	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	73
4.1.3	Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	75
4.2	Hasil Deteksi Metode Model Regresi.....	77
4.2.1	Uji Hausman.....	77
4.3	Hasil Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	77
4.3.1	Deteksi Normalitas.....	77
4.3.2	Deteksi Autokorelasi.....	78
4.3.3	Deteksi Heterokedastisitas.....	79
4.3.4	Deteksi Multikolinearitas.....	80
4.4	Hasil Uji Statistik.....	82
4.4.1	Koefisien Determinasi (R^2).....	82
4.4.2	Uji F.....	83
4.4.3	Uji t.....	83
4.5	Interpretasi dan Hasil Pembahasan.....	85
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		92
5.1.	Simpulan.....	92
5.2.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....		94
LAMPIRAN.....		97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Negara-Negara ASEAN Tahun 2014.....	4
Tabel 1.2 Proporsi Pengeluaran Pemerintah Pusat Pada Pendidikan, dan Kesehatan Tahun 1990-2017.....	7
Tabel 1.3 Index Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010-2018.....	13
Tabel 1.4 Nilai Peringkat IPM ASEAN Tahun 2016.....	14
Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu.....	55
Tabel 4.1 Perkembangan IPM Tahun 2010-2018.....	77
Tabel 4.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 1990-2017.....	78
Tabel 4.3 Uji Hausman.....	79
Tabel 4.4 Deteksi Normalitas.....	84
Tabel 4.5 Deteksi Autokorelasi.....	81
Tabel 4.6 Deteksi Heterokedastisitas.....	81
Tabel 4.7 Deteksi Multikolinearitas.....	82
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik.....	83
Tabel 4.9 Uji t.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase kemiskinan Tahun 2010-2018.....	10
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya pengertian pembangunan merupakan proses perubahan manusia yang terus menerus agar mencapai keadaan yang lebih baik, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Priyo Hari Adi, 2009). Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Pembangunan yang dijalankan, harus membutuhkan sarana dan prasarana sebagai pendorong peran manusia dalam pembangunan.

Konsep yang disampaikan oleh Priyo Hari Adi (2009) diatas menjadikan pembangunan yang berpusat pada manusia. Konsep pembangunan yang berpusat manusia memandang inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan pembangunan. Visi ini menjadikan pembangunan dianggap sebagai gerakan rakyat daripada hanya sekedar sebagai proyek pemerintah. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber

daya manusia yang produktif. Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan (Amaliah, 2004).

Investasi modal manusia dalam pembangunan mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) membutuhkan kebijakan pemerintah dengan tepat sasaran agar mampu mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut Mankiw (2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia, yaitu terdiri dari pendidikan dan kesehatan. Perbaikan pendidikan kesehatan SDM diharapkan bisa memperluas kesempatan untuk mencapai hidup yang layak. Modal manusia yang mengacu pada perbaikan pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Meier dan Rauch yang dikutip dalam Aloysius Gunadi Brata (2002) pendidikan merupakan salah satu bagian dalam modal manusia agar memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk upaya meningkatkan kualitas individu melalui proses bimbingan dan pembelajaran agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, berwawasan luas, dan berakhlak mulia. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Perbaikan kualitas modal manusia kedua adalah kesehatan. Dalam pembangunan nasional juga harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan Kesehatan dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi lebih baik sesuai dengan standar kesehatan (Achmad, 2009).

Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Ginting, 2008).

Dilihat dari data statistik, negara Indonesia memiliki jumlah pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan yang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Dapat dilihat pada table 1.1 terdapat perbandingan presentasi pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan negara-negara ASEAN.

Tabel 1.1 Perbandingan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Negara-Negara ASEAN Tahun 2014

Negara	Pengeluaran Publik untuk Pendidikan (%PDB)	Pengeluaran Publik untuk Kesehatan (%PDB)
Singapura	2.9	2.1
Brunei Darussalam	3.6	2.5
Malaysia	6.1	2.3
Thailand	4.1	5.6
Indonesia	3.3	1.1
Vietnam	n.a	3.8
Filiphina	3.4	1.6
Timur Leste	6	1.3
Laos	4.2	0.9
Kamboja	2	1.3
Myanmar	n.a	1

Catatan: n.a. = not available (tidak tersedia).

Sumber: UNDP, 2017. Human Development Report 2013/2014

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar 3,3 % dan pada bidang kesehatan sebesar 1,1% yang tergolong rendah apabila di bandingkan ASEAN lain seperti dengan negara Malaysia dan Thailand. Malaysia merupakan negara yang menduduki peringkat pertama dalam hal proporsi pengeluaran untuk pendidikan yaitu sebesar 6.1% terhadap PDB dan Thailand sebagai negara yang menduduki tingkat pertama dalam hal proposi pengeluaran untuk kesehatan yaitu sebesar 5.6% terhadap PDB. Rendahnya pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia khususnya di kedua sektor ini. Hal ini akan membuat celah munculnya masalah sosial yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan ditengah-tengah masyarakat karena rendahnya mutu pendidikan dan

kesehatan. Rendahnya pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan menunjukkan bahwa prioritas pembangunan selama ini tidak berorientasi pada peningkatan modal manusia sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Ini juga menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam membentuk modal dasar pembangunan manusia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada sisi lain, suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredam gejolak dalam arti mampu menstabilkan situasi menjadi lebih kondusif melalui berbagai kebijakan. Pemerintah merupakan aktor yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Suatu kegiatan ekonomi akan optimal jika terdapat aktifitas pemerintah didalamnya. Pemerintah dapat menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang memacu produksi dan konsumsi. Pihak swasta biasanya mengalokasikan sumber daya yang dimiliki melalui mekanisme pasar, jika sistem pasar benar-benar efisien di dalam mengalokasikan sumber daya, maka peranan pemerintah terbatas, salah satunya ketika terjadi kegagalan dalam *private market* (Samuelson dan Nordhaus, 2005). Pemerintah akan masuk dan menyelesaikan permasalahan kegagalan pasar jika pihak swasta dan individu-individu tidak bersedia memperbaiki keadaan dan mengeluarkan biaya.

Pemerintah dapat melakukan dua jenis kebijakan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal adalah

kebijakan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui instrumen kebijakan dapat menyelamatkan keadaan ketika perekonomian mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi.

Dalam menjalankan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk menjalankannya. Pemerintah dapat menggunakannya sebagai bagian dalam mengelola perekonomian negara. APBN pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU No.1 tahun 2004. Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sistem anggaran berimbang dan dinamis ini menggantikan sistem anggaran sebelumnya pada masa orde lama yang belum membedakan antara anggaran belanja dengan penerimaan. Perbedaan antara anggaran belanja dengan penerimaan akan mempermudah mengetahui berapa besar anggaran belanja pemerintah untuk sektor publik. Sistem penyusunan yang berimbang dan dinamis didasarkan pada *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan UU No.17/2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Undang-undang tersebut menandai dimulainya reformasi manajemen keuangan pemerintah. Adapun pengeluaran APBN untuk pendidikan dan kesehatan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Proporsi Pengeluaran Pemerintah Pusat Pada Pendidikan, dan
Kesehatan Tahun 1990-2017

Tahun	Belanja Pemerintah Pusat (Milliar)	Pengeluaran Pemerintah Pusat (%)	
		Pendidikan	Kesehatan
1990	29.082	12	0.42
1995	51.573	13.43	2.37
2000	190.013	6.85	1.44
2005	411.668	6.31	1.7
2010	781.534	12.36	2.53
2015	1.319.549	9.05	2.56
2016	1.306.696	10.1	4.56
2017	1.315.500	10.9	4.4

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.2 selama tahun 1990 hingga 2017 proporsi pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan selalu berubah-ubah. Pengeluaran sektor pendidikan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1995 yaitu mencapai 13.43 sedangkan pada sektor kesehatan terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2017 jumlah pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan hanya sebesar 10.9 dan pada bidang kesehatan sebesar 4.4. Secara keseluruhan jumlah proporsi pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk sektor pendidikan dibanding kesehatan.

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena efek pembangunan pada kedua sektor pendidikan dan kesehatan tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya. Investasi pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan akan menyebabkan

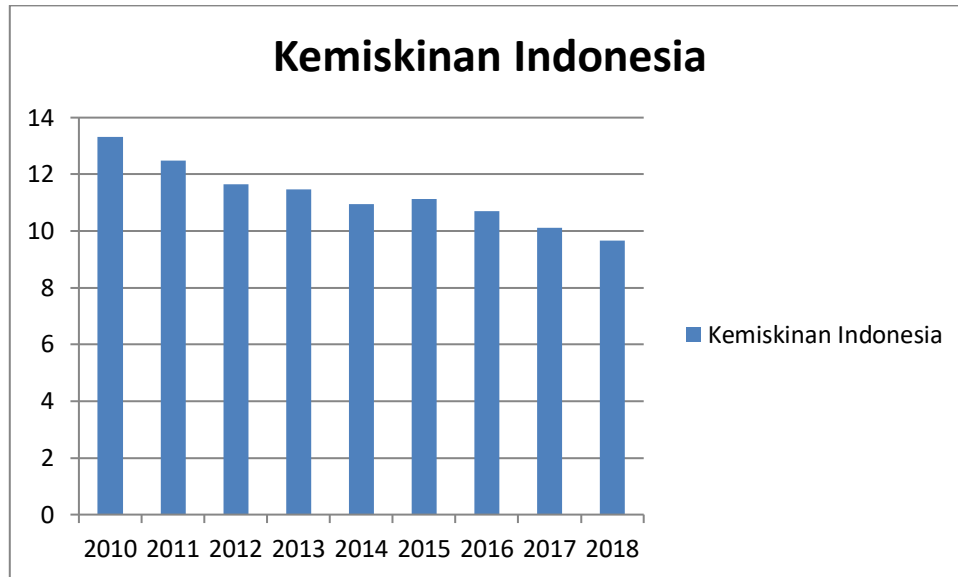
peningkatan kualitas modal manusia dan prasarana fisik. Jika keduanya berjalan dengan baik, maka akan memacu investasi ekonomi. Investasi ekonomi selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan. Terdapat *time lag* ketika pemerintah mengeluarkan anggaran pembangunan atau belanja negara untuk ketiga sektor tersebut dengan dampak kebijakan tersebut, maka dibutuhkan suatu penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*) cukup panjang. Penelitian dengan menggunakan runtun waktu akan membantu melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada kedua sektor tersebut terhadap pembangunan manusia.

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat penting, karena keduanya memiliki peran dalam membangun manusia yang berkualitas. Permasalahannya adalah rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti : makanan, kesehatan, dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya (Ginting, 2008).

Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga

kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2012). Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini pada akhirnya akan berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang mereka peroleh. Jika permasalahan kemiskinan ini tidak teratasi, maka dalam perkembangannya permasalahan ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah.

Krisis ekonomi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1998 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di garis kemiskinan. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010- 2018 kemiskinan mengalami penurunan, Namun pada tahun 2015 jumlah kemiskinan mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum. Pada September 2018, tingkat kemiskinan tercatat 9,66 persen secara nasional. Perkembangan jumlah kemiskinan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 ditunjukkan oleh ditunjukkan pada grafik berikut ini.



Gambar 1.1 Jumlah Kemiskinan Tahun 2010-2018

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018)

Pembangunan sumber daya manusia berkaitan dengan sejumlah dana yang dikeluarkan masa sekarang (saat pembangunan dilakukan) untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam meraih kesempatan memperoleh penghasilan lebih di masa mendatang. Imbalannya adalah tingkat penghasilan yang lebih tinggi, mencapai tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Pembangunan manusia merupakan dampak dari pengembangan modal manusia. Sedangkan perbaikan dari modal manusia itu sendiri tidak terlepas dari perbaikan kinerja ekonomi. Dengan kata lain antara perekonomian dan dampaknya terhadap pembangunan manusia memiliki hubungan yang kuat, begitu pula sebaliknya akibat dari perbaikan kualitas manusia tersebut dalam jangka panjang akan menjadikan perekonomian meningkat (Munawwaroh, 2013).

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*). Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan (Widodo dkk, 2011)

Salah satu alat ukur yang lazim digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah indeks pembangunan manusia. Pada tahun 1990 *United Nation Development Program* (UNDP) memperkenalkan “*Human Development Index* (HDI)” atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan yang sangat mendasar yaitu : kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat. (Winarti, 2014)

Indonesia masih dihadapkan pada masalah yang sangat serius, yaitu masih rendahnya pembangunan manusia. Rendahnya pembangunan manusia tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Dalam

Indeks yang dikeluarkan terakhir oleh UNDP posisi Indonesia 113 dari 188 negara di dunia. Kondisi ini menempatkan Indonesia berada pada kisaran negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pembangunan manusia level menengah. Untuk mengetahui perkembangan IPM Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2. IPM Indonesia antara tahun 2010 sampai dengan 2018 hanya mengalami peningkatan sebesar 4.86% persen, angka tersebut hanya menunjukkan rata-rata peningkatan kurang dari 1% yakni sebesar 0,54 persen setiap tahunnya. Puncak kejayaan peningkatan IPM Indonesia terjadi pada masa Orde Baru, lalu terjadi perhentian perkembangan IPM pada tahun 1998 karena jatuhnya pendapatan per kapita sebagai akibat dari Krisis Moneter. Pada masa Reformasi, yaitu masa yang kini sedang berjalan, peningkatan IPM Indonesia yang lebih dari rata-rata selama ini terjadi pada tahun 1999-2000, 2003, 2006, dan 2009-2012.

Tabel 1.3 Indeks IPM Indonesia Tahun 2010 – 2018

Tahun	IPM Indonesia
2010	66.53
2011	67.09
2012	67.7
2013	68.31
2014	68.9
2015	69.55
2016	70.18
2017	70.81
2018	71.39

(Sumber : BPS, 2018)

Gambar 1.2 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Perkembangan tersebut merupakan hal positif bagi bangsa Indonesia dalam pembangunan sumber daya. Namun, jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia ranking Indonesia jauh di bawah. Hal ini ditunjukkan pada tabel 1.3 dibawah ini

Tabel 1.4 Nilai dan Peringkat IPM Negara-Negara ASEAN Tahun 2016

Peringkat	Negara ASEAN	IPM
1	Singapura	0.925
2	Brunei Darussalam	0.865
3	Malaysia	0.789
4	Thailand	0.74
5	Indonesia	0.689
6	Vietnam	0.683
7	Filiphina	0.682
8	Timor Leste	0.606
9	Laos	0.586
10	Kamboja	0.563
11	Myanmar	0.556

Sumber : UNDP, Human Development Report, 2018

Berdasarkan tabel 1.3, perbandingan IPM antar negara ASEAN menunjukkan disparitas yang cukup tinggi sejak tahun 1998. Negara-negara dengan nilai IPM tinggi di kawasan ASEAN berturut-turut adalah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia masing-masing dengan IPM 0,929, 0,865, dan 0,789 untuk tahun 2016. Sedangkan Indonesia berada pada posisi ke 5, dengan nilai capaian sebesar 0,689 yang angkanya tidak berbeda jauh dengan negara Vietnam dan Filipina.

Padahal pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*human centered development*). Pembangunan yang berpusat pada manusia

yang berkelanjutan berarti suatu negara telah memiliki fundamental pembangunan sumber daya manusia yang tangguh serta dapat dijadikan sebagai salah satu kekuatan untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari luar maupun yang datang dari dalam negara itu sendiri. Salah satu ancaman tersebut dapat berupa perdagangan bebas, dimana Indonesia telah melakukan kerja sama perdagangan dengan negara asia lainnya yang dikenal dengan *Asian Economic Community* pada tahun 2016.

Berkenang dengan hal tersebut, secara konsep pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, serta secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan. IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan yang sangat mendasar yaitu : kesehatan, kualitas pendidikan serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu masih memperdebatkan hubungan pengeluaran pemerintah dengan index pembangunan manusia. Perbedaan hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi tiap-tiap tempat yang diteliti. Studi yang dilakukan oleh Adi Widodo, dkk (2011) mengemukakan bahwa kenaikan belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan diikuti oleh tidak hanya peningkatan IPM namun juga oleh penurunan Persentase penduduknya adalah orang miskin. Munawwaroh (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya

Manusia dan Perekonomian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi dan kausalitas granger. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, tingkat pendidikan dan perekonomian berpengaruh signifikan terhadap kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Jambi.

Penelitian oleh Sazli Mauriza, dkk (2013). Tentang Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Propinsi Aceh. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kawasan Barat dan Kawasan Timur Propinsi Aceh. Kemudian penelitian oleh Christina Usmaliadanti (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009” Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah sekor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembangunan Manusia, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Etibar Jafarov dan Victoria Gunnarsson pada tahun 2008 yang berjudul “*Government Spending on Health Care and Education in*

Croatia: Efficiency and Reform Options”, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah di Kroasia khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat terdapat ketidakefisienan yang signifikan dalam pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan di Kroasia. Pada sektor kesehatan ketidakefisienan disebabkan oleh pengeluaran pemerintah yang terlalu tinggi.

Berkaitan dengan hal fenomena indeks pembangunan manusia di indonesia, maka peneliti tertarik untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan jumlah kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini berjudul “**PENGARUH, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2010-2018**”.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Christina Usmaliadanti, (2010) Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia. Salah satu bukti keseriusan pemerintah tersebut adalah lewat pengeluaran pemerintah yang merupakan cerminan

bukti konkrit peran pemerintah dalam mengatur perekonomian. Sektor pengeluaran pemerintah yang cukup penting dan berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan pembangunan manusia di Indonesia adalah berkaitan dengan naiknya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan PDB yang meningkat setiap tahunnya tidak sebanding dengan kenaikan pembangunan manusia yang tercermin dari nilai IPM Indonesia yang masih rendah. Selain itu, dalam periode pertumbuhan yang pesat juga terdapat penurunan dalam proporsi masyarakat miskin di Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan pembangunan manusia masih lambat seiring dengan terjadinya penurunan proporsi masyarakat miskin sehingga capaian IPM Indonesia masih tergolong rendah.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap pembangunan manusia di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap pembangunan manusia di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh jumlah kemiskinan terhadap pembangunan manusia di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada khususnya.
2. Dapat digunakan sebagai sumber masukan yang berguna bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang serta menjadi referensi.
3. Dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian yang sama